

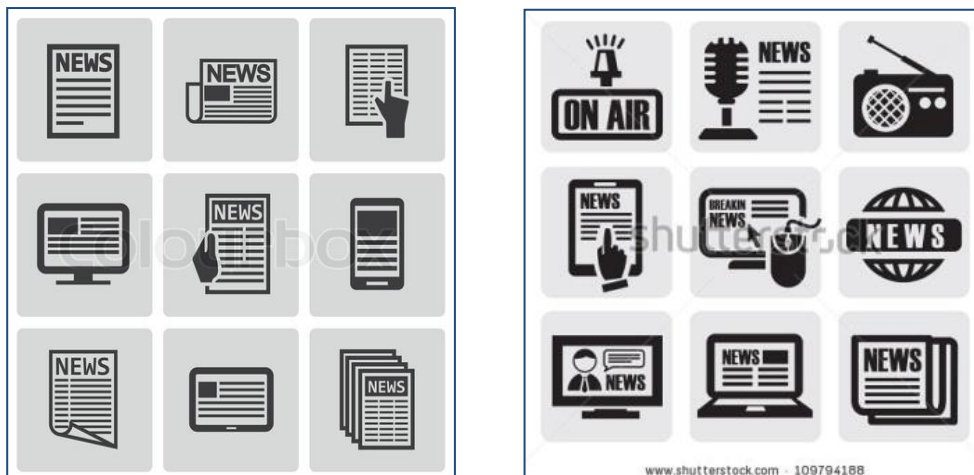


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Ekonomi

Selasa, 8 Januari 2019



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2018**

Daftar Isi

1. PEMBANGUNAN EKONOMI MARITIM (*Media Online Kompas*)
2. DATA EKSPORT DIINTEGRASIKAN (*Media Online Kompas*)
3. PEMERINTAH REALISTIS DENGAN TARGET EKSPOR (*Media Online Republika*)

KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Selasa

8 Januari 2019

Pembangunan Ekonomi Maritim

Rokhmim Dahuri

Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan IPB, Ketua Umum Gerakan Nelayan Tali Indonesia

Setelah 73 tahun merdeka, Indonesia masih menjadi negara berkembang berpendapatan menengah bawah dengan rata-rata pendapatan nasional kotor (GNI) 3.800 dollar AS per kapita.

Sebuah negara dinobatkan sebagai negara makmur (berpendapatan tinggi) apabila GNI per kapita di atas 12.235 dollar AS (Bank Dunia, 2017). Dengan kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk 267 juta jiwa (terbesar keempat dunia), dan bonus demografi 2020-2040, Indonesia diprediksi menjadi negara maju dan makmur 2045 (Price-waterhouseCooper, 2018).

Saat itu, kekuatan ekonomi (PDB) Indonesia mencapai 73 triliun dollar AS (terbesar keempat di dunia) dengan rata-rata GNI per kapita 15.000 dollar AS. Dari perspektif ekonomi, prediksi akan menjadi kenyataan apabila Indonesia mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi (di atas 7 persen/tahun), banyak menyerap tenaga kerja, menyejahterakan rakyat, dan berkelanjutan.

Ekonomi maritim

Sebagai negara kepulauan terbesar dunia dengan 17.504 pulau dan tiga perempat wilayah berupa laut, ekonomi maritim menawarkan potensi menghadirkan pertumbuhan ekonomi tinggi, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Ekonomi maritim Indonesia meliputi 11 sektor: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan

perikanan dan hasil laut, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) ESDM, (6) pariwisata bahari, (7) perhubungan laut, (8) kehutanan, (9) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, dan (11) SDA nonkonvensional.

Potensi nilai ekonomi 1,5 triliun dollar AS/tahun atau 1,5 kali PDB dengan potensi lapangan kerja 45 juta orang atau 35 persen total angkatan kerja. Namun, potensi maritim ini baru dimanfaatkan 25 persen.

Sebagai ilustrasi, Indonesia memiliki 3 juta hektar (ha) lahan pesisir yang cocok untuk budidaya tambak udang vaname. Jika kita mampu mengembangkan usaha 500.000 ha tambak udang vaname dengan produktivitas rata-rata 40 ton/ha/tahun (moderat) saja, bisa dihasilkan 20 juta ton atau 20 miliar kilogram udang tiap tahun. Dengan harga udang saat ini 5 dollar AS/kg, nilai ekonomi langsungnya 100 miliar dollar AS/tahun atau sekitar 10 persen PDB saat ini.

Jika mulai tahun depan sampai 2024 kita buka usaha 100.000 ha tambak udang vaname setiap tahun, dari udang ini saja bisa disumbangkan 2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi per tahun. Maka, pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun bagi maritim Indonesia adalah keniscayaan.

Masih banyak komoditas budidaya laut lain dengan nilai ekonomi sangat tinggi, seperti udang windu, ikan bandeng, nila salin, kerapu, kakap, bawal bintang, kepiting, lobster, gonggong, abalone, teripang, kerang mutiara, dan rumput laut.

Di sisi lain, sejak 2012, IPB menemukan empat spesies mikroalga laut dengan kandungan hidrokarbon 20 persen dari total berat kering dan telah menghasilkan *biofuel*.

Jika kita kembangkan budidaya mikroalga ini seluas 2 juta ha areal laut pesisir (0,3 persen total wilayah laut Indonesia)

terintegrasi dengan industri pengolahannya, bisa diproduksi 2 juta barel *biofuel*/hari. Jumlah ini melampaui kebutuhan minyak mentah nasional 1,4 juta barel/hari sehingga kita tidak perlu lagi impor minyak Rp 500 triliun/tahun.

Dengan keragaman hayati laut (*marine biodiversity*) terbesar dunia, Indonesia memiliki potensi industri bioteknologi kelautan luar biasa besar, total nilai ekonomi empat kali lipat industri teknologi informasi.

Industri ini meliputi tiga cabang industri: (1) *genetic engineering* untuk menghasilkan bibit dan benih fauna serta flora unggul, (2) ekstraksi senyawa bioaktif dari organisme laut, dan (3) bioremediasi lingkungan.

China berhasil mendayagunakan padi di perairan laut dengan hasil 9 ton/ha/panen (Yangzhou University, 2017). Artinya, budidaya padi berbasis bioteknologi bisa melampaui budidaya padi daratan pangon.

Posisi strategis

Posisi geoekonomi-geopolitik Indonesia sebagai penghubung Samudra Pasifik dan Hindia serta Benua Asia dan Australia membuat peran kemaritiman bagi Indonesia semakin krusial. Ada 45 persen dari total barang perdagangan dunia diangkut dengan ribuan kapal melalui tiga alur laut kepulauan Indonesia dengan total nilai ekonomi 15 triliun dollar AS/tahun (UNCTAD, 2010).

Oleh sebab itu, sangat tepat pemerintah Presiden Joko Widodo menjadikan kemaritiman sebagai salah satu prioritas dengan *top line* Indonesia sebagai poros maritim dunia. Banyak kemajuan di bidang



seluruh wilayah Nusantara. Disparitas harga barang antar-wilayah menurun signifikan. Jumlah wisatawan asing ke Indonesia untuk menikmati pariwisata bahari meningkat dari 3 juta orang pada 2014 menjadi 6 juta orang pada 2017.

Namun, masih banyak masalah di kehidupan nelayan dan usaha perikanan. Oleh karena itu, ke depan kita mesti meluruskan orientasi pembangunan maritim sesuai tujuan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, yakni menjadikan Indonesia maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis ekonomi, hankam, dan budaya maritim.

Dalam jangka pendek-menengah (2019-2024), yang harus dilakukan adalah penyempurnaan dan implementasi rencana tata ruang wilayah secara terpadu dari lahan atas-pesisir-lautan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Dalam ruang wilayah antara daratan pesisir dan laut sampai 12 mil, pertama harus dialokasikan minimal 30 persen dari total wilayah untuk kawasan lindung. Sebanyak 70 persen wilayah sisanya bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan pembangunan.

Kedua, optimalisasi sektor perikanan tangkap dengan cara mengembangkan 10.000 kapal modern ukuran 50 GT-500 GT untuk memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah-wilayah laut yang masih *under-fishing* dan menjadi ajang *illegal fishing*. Wilayah laut dimaksud antara lain Laut Natuna, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Aru, perairan barat Sumatera, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Kapal-kapal ikan modern di atas 400 GT juga bisa kita gunakan untuk menangkap caka-

lang, tuna, dan ikan pelagis besar lain di laut lepas (di atas 200 mil). Selain di Bitung, untuk mendaratkan, mengolah, dan memasarkan ikan hasil tangkapan 10.000 kapal ikan modern itu, kita harus membangun pelabuhan-pelabuhan perikanan baru yang terintegrasi dengan kawasan industri perikanan berkelas internasional di Aceh, Natuna, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Baubau, Morotai, Sorsidjen Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, yakni menjadikan Indonesia maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis ekonomi, hankam, dan budaya maritim.

Namun, masih banyak masalah di kehidupan nelayan dan usaha perikanan. Oleh karena itu, ke depan kita mesti meluruskan orientasi pembangunan maritim sesuai tujuan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, yakni menjadikan Indonesia maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis ekonomi, hankam, dan budaya maritim.

Dalam jangka pendek-menengah (2019-2024), yang harus dilakukan adalah penyempurnaan dan implementasi rencana tata ruang wilayah secara terpadu dari lahan atas-pesisir-lautan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Dalam ruang wilayah antara daratan pesisir dan laut sampai 12 mil, pertama harus dialokasikan minimal 30 persen dari total wilayah untuk kawasan lindung. Sebanyak 70 persen wilayah sisanya bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan pembangunan.

Kedua, optimalisasi sektor perikanan tangkap dengan cara mengembangkan 10.000 kapal modern ukuran 50 GT-500 GT untuk memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah-wilayah laut yang masih *under-fishing* dan menjadi ajang *illegal fishing*. Wilayah laut dimaksud antara lain Laut Natuna, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Aru, perairan barat Sumatera, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Kapal-kapal ikan modern di atas 400 GT juga bisa kita gunakan untuk menangkap caka-

dan mendulang devisa sedikitnya 10 miliar dollar AS/tahun mulai tahun 2020.

Ketujuh, revitalisasi semua usaha produksi dan pengolahan sektor ESDM yang sekarang terdapat di wilayah pesisir dan laut supaya lebih efisien, berdaya saing, inklusif, dan ramah lingkungan.

Kedelapan, industri dan jasa maritim sekarang (gula dan jasa kapal, *dockyards*, pabrik jaring, dan alat tangkap lain harus ditingkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan keberlanjutannya.

Kesembilan, sampai sekarang, sekitar 90 persen dari barang yang diekspor dan diimpor Indonesia diangkut oleh perusahaan-perusahaan kapal asing dan 50 persen total kapal angker antarpulau (dalam negeri) juga masih perusahaan asing.

Meski kita berhasil menurunkan biaya logistik dari 26 persen PDB tahun 2014 jadi 21 persen PDB tahun lalu, itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand yang kurang dari 15 persen PDB. Oleh sebab itu, kita harus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing perusahaan-perusahaan transportasi laut nasional dan pelabuhan-pelabuhan kita.

Dalam jangka panjang (2024-2045), kita harus mampu mengembangkan minimal 75 persen dari ruang lingkup (domain) 11 sektor ekonomi maritim RI seperti industri bioteknologi dan nanoteknologi kelautan, industri air laut dalam, pertambangan mineral laut dalam, dan energi dari gelombang, arus laut, dan OTEC.

Dengan mengimplementasikan peta jalan pembangunan ekonomi maritim di atas, niswaca Indonesia akan naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas dengan rata-rata GNI sebesar 8.000 dollar AS pada 2024 dan rata-rata GNI 15.000 dollar AS pada 2045.

Setelah 73 tahun merdeka, Indonesia masih menjadi negara berkembang berpendapatan menengah bawah dengan rata-rata pendapatan nasional kotor (GNI) 3.800 dollar AS per kapita dan sebagai negara kepulauan terbesar dunia dengan 17.504 pulau dan tiga perempat wilayah berupa laut, ekonomi maritim menawarkan potensi menghadirkan pertumbuhan ekonomi tinggi, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Hashtag Berita :

#Kemaritiman #Kepulauan #KetahananPanganNasional #PelaksanaanProgramNasional #ProdukDomestikBruto #StabilitasEkonomiIndonesia #Perikanan #SwasembadaPangan #Infrastruktur #KesejahteraanMasyarakat #PertumbuhanEkonomiNasional

KOMPAS

Selasa

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

8 Januari 2019

Data Ekspor Diintegrasikan

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mengintegrasikan data dan informasi secara terkait ekspor-impor. Langkah ini untuk mengoptimalkan insentif pajak dan devisa.

JAKARTA, KOMPAS — Integrasi ditempuh untuk mengoptimalkan pemberian insentif pajak sehingga devisa hasil ekspor bisa bertahan lama di dalam negeri. Alur dokumen, barang, dan uang pun termonitor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selama ini alur dokumen dan barang dicatat Bea Cukai Kementerian Keuangan. Adapun alur uang dicatat oleh Bank Indonesia. Integrasi penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai data ekspor dan impor Indonesia.

"Khusus ekspor, ada mandatori pemberian insentif pajak sehingga akurasi dan informasi jadi penting," kata Sri Mulyani sesuai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Senin (7/1/2019) sore.

Sinkronisasi data dilakukan melalui sistem monitoring devisa terintegrasi seketika atau disingkat Simodis. Secara teknis, Simodis akan mengintegrasikan aliran dokumen, barang, dan uang melalui dokumen ekspor dan impor dari Direktorat

Jenderal Bea Cukai dan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak, serta data dari Bank Indonesia.

Simodis juga digagas untuk mendukung paket ekonomi XVI terkait peningkatan devisa ekspor. Dalam rancangan peraturan pemerintah (PP) yang baru, devisa ekspor sumber daya alam harus dilaporkan dalam sistem keuangan dan ditempatkan di rekening khusus pada bank devisa dalam negeri.

Penempatan di rekening khusus wajib ini dilaksanakan paling lambat akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah pendaftaran pemberitahuan ekspor. Devisa ekspor yang disimpan dalam rekening khusus akan mendapat insentif Pajak Penghasilan (PPh) final atas bunga deposito sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015.

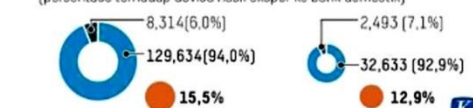
PPh atas bunga deposito dalam dollar AS berkisar 0-10 persen, bergantung pada jangka waktu penempatan. Adapun devisa ekspor dalam deposito rupiah dikenai tarif 0-7,5 persen. Semakin lama devisa ekspor

Kondisi Devisa Ekspor Indonesia

Dalam miliar dollar AS



■ Devisa hasil ekspor yang masuk ke bank domestik
■ Devisa hasil ekspor yang diterima melalui bank di LN



Sumber: Bank Indonesia

INFOGRAFIK NINGSI AWATI

bertahan di dalam negeri, PPh makin kecil.

Berdasarkan data Bank Indonesia, devisa hasil ekspor Januari-Juni 2018 sebesar 69,88 miliar dollar AS. Dari jumlah itu, yang masuk ke dalam negeri sekitar 92,6 persen atau 64,74 miliar dollar AS. Namun, hanya 13,3 persen di antaranya yang dikonversi ke dalam rupiah.

Dijamin

Implementasi pelaporan devisa hasil ekspor paling lambat akhir bulan Maret karena pemberitahuan ekspor barang (PEB) baru terbit 1 Januari 2019. Kendati ditempatkan dalam negeri, pemerintah menjamin eksportir tetap bisa menggunakan devisa hasil ekspor untuk pinjaman luar negeri,

impor bahan baku, keuntungan atau dividen, dan keperluan lain untuk penanaman modal. Eksportir juga tidak diwajibkan mengonversi devisa dari dollar AS ke rupiah atau menjual ke negara.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badarudin menambahkan, sinkronisasi informasi ini bisa dimanfaatkan untuk melacak kejahatan perpajakan yang belakangan marak terkait pencucian uang. PPATK akan memanfaatkan data Simodis untuk keperluan itu.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan BI Farida Peranginangin mengatakan, sistem akan membantu BI menerima catatan arus data, komoditas, dan uang setiap hari.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati berpendapat, kebutuhan data yang aktual dan terintegrasi dibutuhkan untuk mengetahui tren ekspor-impor Indonesia.

(KRN/LSA)

Sistem integrasi data dan informasi devisa terkait ekspor-impor. Sistem ini dinilai mampu mengoptimalkan insentif pajak dan devisa negara. Sistem ini sangat penting untuk mengontrol dari sisi kebutuhan strategi ekspor. Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana hubungan antara besaran ekspor dengan devisa yang didapatkan sekaligus memberikan gambaran utuh mengenai data ekspor dan impor Indonesia.

Hashtag Berita :

#EksporImpor #NeracaPerdagangan #DevisaNegara #Perpajakan #APBN #PMA #PMDN #PertumbuhanEkonomiNasional #StabilitasEkonomiIndonesia #KesejahteraanMasyarakat #Infrastruktur #PelaksanaanProgramNasional

Pemerintah Realistis dengan Target Ekspor

● ADINDA PRYANKA

JAKARTA — Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengakui, target pertumbuhan ekspor nonmigas sepanjang 2018 tidak dapat mencapai target 11 persen. Ia mencoba realistis dengan melihat kinerja ekspor pada periode Januari hingga November 2018 yang hanya 7,47 persen.

Meski begitu, Enggar mengapresiasi pertumbuhan ekspor nonmigas karena sudah berada di atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Menurut dia, pertumbuhan 7,47 persen sepanjang 11 bulan pada 2018 sudah mampu menyokong pertumbuhan ekonomi secara makro. Ia memprediksi, pertumbuhan ekspor rata-rata sepanjang 2018 akan mencapai 7,5 persen.

"Untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi 5,2 atau 5,3 persen, ada beberapa persyaratan, termasuk komponen nilai tukar dan ekspor. Angka 7,5 persen sudah di atas parameter [persyaratan]," kata Enggar ketika ditemui di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (7/1).

Enggar menuturkan, salah satu tantangan terbesar kinerja ekspor pada 2018 adalah perang dagang yang diprediksi masih berlangsung sampai tahun ini. Namun, ia optimistis, Indonesia tetap dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Dalam kondisi perang dagang saat ini, daya beli dari negara lain pasti menurun. Kondisi tersebut tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di negara lain.

"Makanya, Bank Dunia pun menurunkan target pertumbuhan ekonomi dunia," ujar Enggar.

Untuk mengantisipasi kondisi ini, Enggar menuturkan, pemerintah terus berupaya melakukan perjanjian perdagangan dengan banyak negara. Bentuknya berupa kesepakatan perdagangan bebas, kesepakatan perdagangan preferensi, maupun kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif.

Untuk target pertumbuhan ekspor pada 2019, Kementerian Perdagangan baru akan memutuskannya dalam rapat kerja di awal Februari. "Sebagai acuan, kami tidak akan patok lebih rendah dari 2018," ujar Enggar.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, perang dagang akan berimbas besar pada ekspor Indonesia. Sebab, Cina menjadi salah satu pasar paling signifikan. Sedangkan, menurut prediksi internasional, Negeri Tirai Bambu akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, yakni 6,2 persen dari proyeksi awal 6,6 persen.

Selain itu, Rosan menambahkan, faktor penentu lainnya adalah harga komoditas internasional. Tingkat ekspor Indonesia banyak bergantung pada harga komoditas dunia.

Kondisi saat ini, harga komoditas tidak terlalu tinggi dan dikhawatirkan jika perekonomian Cina melemah, ekspor Indonesia ke Cina menurun. "Dampaknya akan sampai ke pertumbuhan ekonomi, terutama ekspor," kata Rosan.

Namun, Rosan menambahkan, pemerintah dan pengusaha berupaya untuk terus mendorong investasi agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Selain itu, konsumsi domestik juga terlihat cukup baik, begitu juga dengan pertumbuhan industri yang mencapai 5,3 sampai 5,4 persen, melebihi produk domestik bruto (PDB).

Pertumbuhan industri tersebut dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena, biasanya, pertumbuhan industri selalu di bawah PDB. "Dengan begitu, diharapkan pertumbuhan kita akan jauh lebih baik pada 2019 ini," ujar Rosan.

Badan Karantina Pertanian (Barantan), Kementerian Pertanian, juga terus mendorong potensi ekspor. Salah satunya melalui perjanjian Sanitary and Phytosanitary (SPS). ■ ed: fuji pratwi

PEMERINTAH REALISTIS DENGAN TARGET EKSPOR

Pemerintah melalui kementerian Perdagangan mengakui, target pertumbuhan ekspor nonmigas sepanjang 2018 tidak dapat mencapai target 11 persen. Ia mencoba realistis dengan melihat kinerja ekspor pada periode Januari hingga November 2018 yang hanya 7,47 persen. Meski begitu, Enggar mengapresiasi pertumbuhan ekspor nonmigas karena sudah berada di atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Menurut dia, pertumbuhan 7,47 persen sepanjang 11 bulan pada 2018 sudah mampu menyokong pertumbuhan ekonomi secara makro. Ia memprediksi, pertumbuhan ekspor rata-rata sepanjang 2018 akan mencapai 7,5 persen. Untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi 5,2 atau 5,3 persen, ada beberapa persyaratan, termasuk komponen nilai tukar dan ekspor. Salah satu tantangan terbesar kinerja ekspor pada 2018 adalah perang dagang yang diprediksi masih berlangsung sampai tahun ini. Namun, ia optimistis, Indonesia tetap dapat memanfaatkan peluang yang ada. Dalam kondisi perang dagang saat ini, daya beli dari negara lain pasti menurun. Kondisi tersebut tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di negara lain.

Hashtag Berita :

#DevisaNegara #EksporImpor #PMA
#PMDN #APBN #NeracaPerdagangan
#DuniaIndustri #Infrastruktur #RKP
#PertumbuhanEkonomiNasional
#StabilitasEkonomiIndonesia
#PelaksanaanProgramNasional
#KesejahteraanMasyarakat